



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI**

Jalan Adi Sucipto No. 2. A Telepon (0567) 21205, Fax. (0567) 21205  
PUTUSSIBAU

Kode Pos 78715

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN  
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 45 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN  
TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS TENAGA KERJA,  
PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN KAPUAS HULU,**

- MENINGAT** : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di adakan perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas ditetapkan dengan keputusan.
- MENIMBANG** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemebentukan Peraturan Perundang–Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523 );
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 64 Tahun 2016 tentang kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021;

### **Memutuskan**

MENETAPKAN :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu untuk:
1. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
  2. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran
  3. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja
  4. Pengukuran kinerja;
  5. Penyusunan Laporan kinerja;
  6. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
  7. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau,  
Pada Tanggal November 2019  
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja,  
Perindustrian dan Transmigrasi  
Kabupaten Kapuas Hulu,



H. ABDUL KARIM

Pembina Utama Muda

NIP. 19610818 199403 1 003

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS NOMOR 45 TAHUN 2019  
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI**

1.

Tugas

:

Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja, Bidang Perindustrian dan Bidang Transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
2.

Fungsi

:

a.

perumusan kebijakan teknis di Bidang Tenaga Kerja, Bidang Perindustrian dan Bidang Transmigrasi;

b.

pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Tenaga Kerja, Bidang Perindustrian dan Bidang Transmigrasi;

c.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Tenaga Kerja, Bidang Perindustrian dan Bidang Transmigrasi;

d.

pelaksanaan administrasi Dinas; dan

e.

pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data
	Sasaran Rpjmd yang dituju	Sasaran Strategis			
1	2	3	4	5	6
1		Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	$\frac{\text{Jumlah angkatan kerja}}{\text{Jumlah Penduduk usia kerja ( 15 – 60 )}} \times 100 \%$	Kapuas Hulu dalam Angka
			Jumlah Lapangan Kerja Baru	Banyaknya lapangan pekerja baru pada tahun n	Data Jumlah Lapangan Kerja Kab/Kota ( Bidang Tenaga Kerja )

2		Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang Patuh terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang patuh terhadap undang-undang Ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 100$	Data Bidang Tenaga Kerja
			Persentase Penurunan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	$\frac{\text{Jumlah kasus Perselisihan Hubungan Industrial Tahun n} - \text{Jumlah Kasus Perselisihan Tahun n-1}}{\text{Jumlah Kasus Perselisihan Tahun n - 1}}$	Data Perselisihan Hubungan Industrial Kab/Kota ( Bidang Tenaga Kerja )
3		Meningkatnya Pendapatan Warga Transmigrasi	Persentase Warga Transmigran yang meningkat Pendapatannya	$\frac{\text{Jumlah Warga Transmigran yang meningkat Pendapatannya ( bersifat Relatif )}}{\text{Jumlah Transmigran}}$	Data Upt
4		Meningkatnya daya saing dan kapasitas produksi sektor industri	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri	$\frac{\text{Pdrb atas dasar harga konstan sektor produksi tahun n}}{\text{Pdrb atas dasar harga konstan sektor produksi tahun n-1}} \times 100 \%$	Kapus hulu dalam angka

Ditetapkan di Putussibau,  
Pada Tanggal     November 2019  
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja,  
Perindustrian dan Transmigrasi  
Kabupaten Kapuas Hulu,



H. ABDUL KARIM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610818 199403 1 003